

11

**DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEMUDAYAAN PROVINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
JALAN TIDAR No.123 SURABAYA**

Nomor : 13/Sq/D.1/79
Lampiran : 1 daftar

S A L I N A N dari surat putusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEMUDAYAAN PROVINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

MEMBUKA : Surat Kepala Kantor PD dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tanggal 19 April 1979 No. P.001/D.7/1979 tentang hal awal nomor 101 Sekolah Dasar Negeri.

MENIMBANG : 1. Bahwa pada dewasa ini di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri yang terdiri sebagai akibat dari pada pendirian Sekolah Dasar Negeri Impres, Sekolah Dasar Negeri Usaha Masyarakat dan Sekolah Dasar Negeri dari pemecahan, di samping terdapatnya perubahan/penghapusan nama Sekolah Dasar Negeri karena perubahan/penghapusan nama Desa dan sebagainya.
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas dibidang administrasi (inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/anggota-lembaga Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas tersebut dan menetapkan kembali kelengkapan Sekolah Dasar Negeri dengan memberikan nama dan nomor Sekolah Dasar Negeri yang berada di Daerah Tingkat II Kabupaten / Kotamadya so Jawa Timur.

MENINGGAT : 1. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 1952 Nomor : B.H. 31/1619 ;
3. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 ;
4. Inpres 10/73, Inpres 6/74, Inpres 6/75, Inpres 3/76, Inpres 3/77 dan Inpres 6/78 ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

KESATU : Mencahut Surat Edaran Kepala Dinas PD dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Maret 1974 No. 1030/A.2 tentang penyederhanaan-nama/sebutan Sekolah Rakyat (S R) di Jawa Timur.

KEDUA : Menetapkan nama dan nomor Sekolah-Sekolah Dasar Negeri yang berada di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Gubernur KDH. Tk. I Jawa Timur
Diro Kerasiaan di Surabaya.
2. Kwil Dept. P dan K Propinsi Jawa
Dld. Pond. Dasar (Gentengkali 33 Surabaya).
3. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Bojonegoro
4. Kep. Kant. PD dan K Kab. Daerah Tk. II
Bojonegoro.
5. Kep. Kant. Dept. P dan K Kab. Daerah Tk. II
Bojonegoro.
6. Pembantu Kantor PD dan K Kecamatan so Kabupaten
Daerah Tk. II Bojonegoro (20).
7. Dinas PD dan K Prop. Dati I Jatim (Dag. Pegawai) di Surabaya.
KUTIPAN : kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

ditetapkan di : Surabaya
tanggal : 1 April 1979.
**KEPALA DINAS PD DAN K PROVINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR,**
S. H. ENARKO, S.H.
I P. 510040076


Kab. Bojonegoro.

1	2	3	4	5
Kaliombo	Kaliombo I ✓	489	Purwoarai	
Kaliombo	Kaliombo II ✓	490	"	Inpr.
Ngrejeng	Ngrejeng	491	"	
Pelem	Pelem I	492	"	
Pelem	Pelem II	493	"	Inpr.
Tambakrejo	Tambakrejo I	494	Tambakrejo	
Tambakrejo	Tambakrejo II	495	"	Inpr.
Gamongan	Gamongan I	496 ✓	"	
Jatimulyo	Jatimulyo I	497	"	
Jatimulyo	Jatimulyo II	498	"	Inpr.
Ngrancang	Ngrancang I	499	"	
Ngrancang	Ngrancang II	500	"	Inpr.
Napis	Napis I	501	"	
Napis	Napis II	502	"	Inpr.
Napis	Napis III	503	"	Inpr.
Plimping	Sukorejo I	504	"	
Sukorejo	Sukorejo II	505	"	Inpr.
Jawik	Jawik	506	"	
Tanjung	Tanjung	507	"	
Gading	Gading I	508 ✓	"	
Kalisumber	Kalisumber I	509	"	
Kalisumber	Kalisumber II	510	"	Inpr.
Dolakgede	Dolakgede	511	"	
Sondangrejo	Sondangrejo	512	"	Inpr.
Ngecep	Mulyorejo I	513	"	
Mulyorejo	Mulyorejo II	514	"	Inpr.
Bakalan	Bakalan	515 ✓	"	Inpr.
Malingpati	Malingpati I	516	"	
Malingpati	Malingpati II	517	"	Inpr.
Turi	Turi I	518	"	
Pati	Turi II	519	"	Inpr.
Bojowali	Ngraho	520	Ngraho	
Tinggang	Bancer I	521	"	
Tinggang	Payaman I	522	"	Inpr.
Klampun	Klampun	523	"	
Pruwu	Sumberarum I	524	"	
Sumberarum	Sumberarum II	525	"	
Tapelan	Tapelan I	526	"	
Tapelan	Tapelan II	527	"	Inpr.
Mojoarjo	Mojoarjo I	528 ✓	"	
		529		

Kab. Bojonegoro.

1	2	3	4	5
D o l i n g	1. Doling III	1 571	1 Ngambon	1 Inpr.
Nglampin	1. Nglampin I	1 572 ✓	1 "	1 Inpr.
K l i n o	1. K l i n o I	1 573	1 "	1 Inpr.
K l i n o	1. K l i n o II	1 574	1 "	1 Inpr.
Barong	1. Barong I	1 575	1 "	1 Inpr.
Barong	1. Barong II	1 576	1 "	1 Inpr.

KEPALA DINAS P D DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR



ROJHARKO, SH
NIP 510048076.



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 23 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan urusan teknis operasional yang tidak terakomodir dalam Tupoksi Dinas serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa-Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Satuan Pendidikan Formal adalah Unsur pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
9. Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Non Formal.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi UPTD Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pasal 4

Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Balen terdiri dari :
TK Negeri Pembina Balen
- b. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Bojonegoro terdiri dari :
TK Negeri Pembina Bojonegoro
- c. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Purwosari terdiri dari :
TK Negeri Pembina Purwosari
- d. Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Kapas terdiri dari :
TK Negeri Model Terpadu Bojonegoro

Pasal 5

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Balen terdiri dari :
 1. SD Negeri Balenrejo;
 2. SD Negeri Bulaklo;
 3. SD Negeri Bulu I;
 4. SD Negeri Bulu II;
 5. SD Negeri Kabunan;
 6. SD Negeri Kedungbondo II;
 7. SD Negeri Kedungbondo III;
 8. SD Negeri Kedungdowo II;
 9. SD Negeri Kemamang;
 10. SD Negeri Kenep II;
 11. SD Negeri Lengkong;
 12. SD Negeri Margomulyo I;
 13. SD Negeri Margomulyo II;
 14. SD Negeri Mayangkawis I;
 15. SD Negeri Mayangkawis II;
 16. SD Negeri Mulyoagung;
 17. SD Negeri Mulyorejo I;
 18. SD Negeri Mulyorejo II;
 19. SD Negeri Ngadiluhur I;
 20. SD Negeri Ngadiluhur II;

26. SD Negeri Trenggulunan I;
 27. SD Negeri Trenggulunan II;
 28. SD Negeri Wadang I;
 29. SD Negeri Wadang II;
 30. SD Negeri Wadang III.
- s. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Ngraho terdiri dari :
1. SD Negeri Bancer I;
 2. SD Negeri Blimbinggede I;
 3. SD Negeri Jumok I;
 4. SD Negeri Jumok II;
 5. SD Negeri Jumok III;
 6. SD Negeri Kalirejo I;
 7. SD Negeri Kalirejo II;
 8. SD Negeri Kalirejo III;
 9. SD Negeri Klempun;
 10. SD Negeri Luwihaji II;
 11. SD Negeri Luwihaji I;
 12. SD Negeri Luwihaji III;
 13. SD Negeri Mojorejo I;
 14. SD Negeri Mojorejo II;
 15. SD Negeri Nganti I;
 16. SD Negeri Nganti II;
 17. SD Negeri Nganti III;
 18. SD Negeri Nganti IV;
 19. SD Negeri Nganti V;
 20. SD Negeri Ngraho;
 21. SD Negeri Pandan II;
 22. SD Negeri Payaman I;
 23. SD Negeri Payaman II;
 24. SD Negeri Sugihwaras I;
 25. SD Negeri Sugihwaras III;
 26. SD Negeri Sumberagung I;
 27. SD Negeri Sumberagung II;
 28. SD Negeri Sumberarum I;
 29. SD Negeri Sumberarum II;
 30. SD Negeri Sumberarum III;
 31. SD Negeri Tanggungan I;
 32. SD Negeri Tanggungan II;
 33. SD Negeri Tapelan I;
 34. SD Negeri Tapelan III.
- t. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Padangan terdiri dari :
1. SD Negeri Banjarjo I;
 2. SD Negeri Banjarjo III;
 3. SD Negeri Cendono;
 4. SD Negeri Dengok II;

5. SD Negeri Kebonagung;
 6. SD Negeri Kendung;
 7. SD Negeri Kuncen II;
 8. SD Negeri Ngasinan;
 9. SD Negeri Ngeper I;
 10. SD Negeri Ngeper II;
 11. SD Negeri Ngradin I;
 12. SD Negeri Ngradin II;
 13. SD Negeri Nguken;
 14. SD Negeri Padangan I;
 15. SD Negeri Padangan II;
 16. SD Negeri Padangan III;
 17. SD Negeri Prangi;
 18. SD Negeri Purworejo I;
 19. SD Negeri Purworejo II;
 20. SD Negeri Sidorejo I;
 21. SD Negeri Sidorejo II;
 22. SD Negeri Sonorejo I;
 23. SD Negeri Sonorejo II;
 24. SD Negeri Tebon.
- u. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Purwosari terdiri dari :
1. SD Negeri Donan II;
 2. SD Negeri Donan III;
 3. SD Negeri Gapluk;
 4. SD Negeri Kaliombo I;
 5. SD Negeri Kaliombo II;
 6. SD Negeri Kaliombo IV;
 7. SD Negeri Kuniran I;
 8. SD Negeri Kuniran II;
 9. SD Negeri Ngrejeng;
 10. SD Negeri Pelem I;
 11. SD Negeri Pelem II;
 12. SD Negeri Pojok;
 13. SD Negeri Punggur;
 14. SD Negeri Purwosari I;
 15. SD Negeri Purwosari III;
 16. SD Negeri Sedahkidul;
 17. SD Negeri Tinumpuk;
 18. SD Negeri Tlatah.
- v. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Sekar terdiri dari :
1. SD Negeri Bareng I;
 2. SD Negeri Bareng II;
 3. SD Negeri Bareng III;
 4. SD Negeri Bobol I;
 5. SD Negeri Bobol II;

6. SD Negeri Bobol III;
 7. SD Negeri Bobol IV;
 8. SD Negeri Bobol V;
 9. SD Negeri Bobol VI;
 10. SD Negeri Deling I;
 11. SD Negeri Deling II;
 12. SD Negeri Deling IV;
 13. SD Negeri Deling V;
 14. SD Negeri Klino I;
 15. SD Negeri Klino III;
 16. SD Negeri Klino IV;
 17. SD Negeri Klino V;
 18. SD Negeri Miyono I;
 19. SD Negeri Miyono II;
 20. SD Negeri Miyono III;
 21. SD Negeri Sekar I;
 22. SD Negeri Sekar II;
 23. SD Negeri Sekar III.
- w. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Sugihwaras terdiri dari :
1. SD Negeri Alasgung I;
 2. SD Negeri Alasgung II;
 3. SD Negeri Balongrejo I;
 4. SD Negeri Balongrejo II;
 5. SD Negeri Bareng I;
 6. SD Negeri Bareng II;
 7. SD Negeri Bareng III;
 8. SD Negeri Bulu;
 9. SD Negeri Drenges;
 10. SD Negeri Genjor;
 11. SD Negeri Glagahan;
 12. SD Negeri Glagahwangi I;
 13. SD Negeri Glagahwangi II;
 14. SD Negeri Jatitengah;
 15. SD Negeri Kedungdowo;
 16. SD Negeri Nglajang;
 17. SD Negeri Panemon;
 18. SD Negeri Panunggalan I;
 19. SD Negeri Panunggalan II;
 20. SD Negeri Siwalan I;
 21. SD Negeri Siwalan II;
 22. SD Negeri Siwalan III;
 23. SD Negeri Sugihwaras I;
 24. SD Negeri Sugihwaras II;
 25. SD Negeri Sugihwaras III;
 26. SD Negeri Trate;

27. SD Negeri Wedoro I;
 28. SD Negeri Wedoro II.
- x. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Sukonewu terdiri dari :
1. SD Negeri Duyungan I;
 2. SD Negeri Duyungan II;
 3. SD Negeri Jumput;
 4. SD Negeri Kalicilik;
 5. SD Negeri Klepek;
 6. SD Negeri Pacing I;
 7. SD Negeri Pacing II;
 8. SD Negeri Purwoasri I;
 9. SD Negeri Purwoasri II;
 10. SD Negeri Semawot;
 11. SD Negeri Semenkidul;
 12. SD Negeri Sidodadi I;
 13. SD Negeri Sidodadi II;
 14. SD Negeri Sidorejo;
 15. SD Negeri Sitiaji;
 16. SD Negeri Sukosewu;
 17. SD Negeri Sumberjokidul;
 18. SD Negeri Tegalkodo I.
- y. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Sumberrejo terdiri dari :
1. SD Negeri Banjarjo;
 2. SD Negeri Bogangin;
 3. SD Negeri Butoh;
 4. SD Negeri Deru;
 5. SD Negeri Jatigede;
 6. SD Negeri Karangdinoyo I;
 7. SD Negeri Karangdinoyo II;
 8. SD Negeri Karangdowo;
 9. SD Negeri Kayulemah;
 10. SD Negeri Kedungrejo;
 11. SD Negeri Margoagung I;
 12. SD Negeri Margoagung II;
 13. SD Negeri Mejuwet I;
 14. SD Negeri Mejuwet II;
 15. SD Negeri Mlinjeng;
 16. SD Negeri Ngampal I;
 17. SD Negeri Ngampal II;
 18. SD Negeri Pejambon I;
 19. SD Negeri Pekuwon I;
 20. SD Negeri Pekuwon II;
 21. SD Negeri Pekuwon III;
 22. SD Negeri Prayungan I;
 23. SD Negeri Prayungan II;

24. SD Negeri Sambongrejo I;
 25. SD Negeri Sambongrejo II;
 26. SD Negeri Sendangagung;
 27. SD Negeri Sumberharjo I;
 28. SD Negeri Sumberharjo II;
 29. SD Negeri Sumberrejo I;
 30. SD Negeri Sumberrejo II;
 31. SD Negeri Sumberrejo III;
 32. SD Negeri Sumuragung I;
 33. SD Negeri Sumuragung II;
 34. SD Negeri Teleng;
 35. SD Negeri Tlogohaji I;
 36. SD Negeri Tlogohaji II;
 37. SD Negeri Tulungrejo;
 38. SD Negeri Wotan.
- z. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Tambakrejo terdiri dari :
1. SD Negeri Bakalan I;
 2. SD Negeri Bakalan II;
 3. SD Negeri Dolokgede;
 4. SD Negeri Gading I;
 5. SD Negeri Gamongan I;
 6. SD Negeri Gamongan II;
 7. SD Negeri Jatimulyo I;
 8. SD Negeri Jatimulyo III;
 9. SD Negeri Jawik;
 10. SD Negeri Kalisumber I;
 11. SD Negeri Kalisumber II;
 12. SD Negeri Kalisumber III;
 13. SD Negeri Malingmati II;
 14. SD Negeri Malingmati III;
 15. SD Negeri Mulyorejo I;
 16. SD Negeri Mulyorejo II;
 17. SD Negeri Mulyorejo III;
 18. SD Negeri Napis I;
 19. SD Negeri Napis II;
 20. SD Negeri Napis III;
 21. SD Negeri Napis IV;
 22. SD Negeri Napis V;
 23. SD Negeri Napis VI;
 24. SD Negeri Ngrancang I;
 25. SD Negeri Ngrancang III;
 26. SD Negeri Ngrancang IV;
 27. SD Negeri Pengkol;
 28. SD Negeri Sendangrejo;
 29. SD Negeri Sukorejo I;

30. SD Negeri Sukorejo II;
 31. SD Negeri Sukorejo III;
 32. SD Negeri Tambakrejo I;
 33. SD Negeri Tambakrejo II;
 34. SD Negeri Tanjung;
 35. SD Negeri Turi I;
 36. SD Negeri Turi II;
 37. SD Negeri Turi III;
 38. SD Negeri Turi IV.
- aa. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Temayang terdiri dari :
1. SD Negeri Bakulan I;
 2. SD Negeri Bakulan II;
 3. SD Negeri Bakulan III;
 4. SD Negeri Belun;
 5. SD Negeri Buntalan I;
 6. SD Negeri Buntalan II;
 7. SD Negeri Jono I;
 8. SD Negeri Jono II;
 9. SD Negeri Jono III;
 10. SD Negeri Kedungsari;
 11. SD Negeri Kedungsumber I;
 12. SD Negeri Kedungsumber II;
 13. SD Negeri Kedungsumber III;
 14. SD Negeri Ngujung;
 15. SD Negeri Pancur I;
 16. SD Negeri Pandantoyo;
 17. SD Negeri Papringan I;
 18. SD Negeri Papringan II;
 19. SD Negeri Papringan III;
 20. SD Negeri Soko I;
 21. SD Negeri Soko II;
 22. SD Negeri Soko III;
 23. SD Negeri Soko IV;
 24. SD Negeri Temayang I;
 25. SD Negeri Temayang II.
- bb. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Trucuk terdiri dari :
1. SD Negeri Banjarsari I;
 2. SD Negeri Banjarsari III;
 3. SD Negeri Guyangan;
 4. SD Negeri Kandangan I;
 5. SD Negeri Kanten I;
 6. SD Negeri Mori I;
 7. SD Negeri Mori II;
 8. SD Negeri Padang I;
 9. SD Negeri Padang II;

10. SD Negeri Pagerwesi I;
11. SD Negeri Sranak;
12. SD Negeri Sumbangtimun;
13. SD Negeri Sumberjo;
14. SD Negeri Trucuk I;
15. SD Negeri Trucuk II;
16. SD Negeri Tulungrejo I.

Pasal 6

Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

1. SMP Negeri 1 Bojonegoro;
2. SMP Negeri 2 Bojonegoro;
3. SMP Negeri 3 Bojonegoro;
4. SMP Negeri 4 Bojonegoro;
5. SMP Negeri 5 Bojonegoro;
6. SMP Negeri 6 Bojonegoro;
7. SMP Negeri 7 Bojonegoro.
8. SMP Negeri 1 Balen;
9. SMP Negeri 2 Balen;
10. SMP Negeri 1 Baureno;
11. SMP Negeri 2 Baureno;
12. SMP Negeri 3 Baureno;
13. SMP Negeri 1 Bubulan;
14. SMP Negeri 1 Dander;
15. SMP Negeri 1 Gondang;
16. SMP Negeri 2 Gondang;
17. SMP Negeri 1 Kalitidu;
18. SMP Negeri 2 Kalitidu;
19. SMP Negeri 1 Kanor;
20. SMP Negeri 1 Kapas;
21. SMP Negeri 1 Kasiman;
22. SMP Negeri 1 Kedewan;
23. SMP Negeri 1 Kedungadem;
24. SMP Negeri 2 Kedungadem;
25. SMP Negeri 3 Kedungadem;
26. SMP Negeri 1 Kepohbaru;
27. SMP Negeri 2 Kepohbaru;
28. SMP Negeri 1 Malo;
29. SMP Negeri 1 Margomulyo;
30. SMP Negeri 1 Ngambon;
31. SMP Negeri 1 Ngasem;
32. SMP Negeri 1 Ngraho;
33. SMP Negeri 1 Padangan;
34. SMP Negeri 2 Padangan;
35. SMP Negeri 1 Purwosari;

36. SMP Negeri 2 Purwosari;
37. SMP Negeri 1 Sugihwaras;
38. SMP Negeri 2 Sugihwaras;
39. SMP Negeri 1 Sukosewu;
40. SMP Negeri 1 Sumberrejo;
41. SMP Negeri 2 Sumberrejo;
42. SMP Negeri 3 Sumberrejo;
43. SMP Negeri 1 Tambakrejo;
44. SMP Negeri 2 Tambakrejo;
45. SMP Negeri 1 Temayang;
46. SMP Negeri 1 Trucuk;
47. SMP Negeri 1 Sekar;
48. SMP Negeri 1 Gayam;
49. SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro;
50. SMP Negeri Satu Atap Bobol Sekar;
51. SMP Negeri Satu Atap Clebung Bubulan;
52. SMP Negeri Satu Atap Kesongo Kedungadem;
53. SMP Negeri Satu Atap Soko Temayang;
54. SMP Negeri Satu Atap Sugihwaras Ngraho; dan
55. SMP Negeri Satu Atap Turi Tambakrejo.

BAB III

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 7

- (1) UPTD Satuan Pendidikan adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang kegiatan operasional Dinas Pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai wilayah kerjanya.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;

- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri dari :
 - c. Kepala Sekolah;
 - d. Sub Bagian Tata Usaha;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
 - a. Lampiran I : Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
 - b. Lampiran II : Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP),yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS

Pasal 9

UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan proses pembelajaran sesuai struktur kurikulum;
- b. melaksanakan penilaian/evaluasi belajar;
- c. melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler;
- d. melaksanakan manajemen berbasis sekolah;
- e. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa;
- f. mengembangkan kelembagaan;
- g. mengelola dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan;
- h. melaksanakan pengabdian dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI
KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta pengelolaan administrasi Pendidikan, Sekolah Dasar pada masing-masing wilayah kecamatan, ditunjuk 1 (satu) orang koordinator wilayah bidang pendidikan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dibentuk di masing-masing kecamatan.
- (3) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengawas sekolah, disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai ASN lainnya sebagai tugas tambahan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana pasal 11 ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, seorang Koordinator wilayah kecamatan dibantu oleh pejabat pelaksana yang jumlah kebutuhannya berdasarkan beban kerja masing-masing koordinator wilayah.

Pasal 13

Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) terdiri dari :

1. Koordinator Wilayah Kecamatan Bojonegoro;
2. Koordinator Wilayah Kecamatan Kapas;
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Balen;
4. Koordinator Wilayah Kecamatan Sumberrejo;
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Kanor;
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Baureno;
7. Koordinator Wilayah Kecamatan Sugihwaras;
8. Koordinator Wilayah Kecamatan Kepohbaru;
9. Koordinator Wilayah Kecamatan Kedungadem;

10. Koordinator Wilayah Kecamatan Sukosewu;
11. Koordinator Wilayah Kecamatan Trucuk;
12. Koordinator Wilayah Kecamatan Malo;
13. Koordinator Wilayah Kecamatan Kalitidu;
14. Koordinator Wilayah Kecamatan Dander;
15. Koordinator Wilayah Kecamatan Padangan;
16. Koordinator Wilayah Kecamatan Purwosari;
17. Koordinator Wilayah Kecamatan Kasiman;
18. Koordinator Wilayah Kecamatan Kedewan;
19. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngasem;
20. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngambon;
21. Koordinator Wilayah Kecamatan Tambakrejo;
22. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngraho;
23. Koordinator Wilayah Kecamatan Margomulyo;
24. Koordinator Wilayah Kecamatan Temayang;
25. Koordinator Wilayah Kecamatan Bubulan;
26. Koordinator Wilayah Kecamatan Gondang;
27. Koordinator Wilayah Kecamatan Sekar; dan
28. Koordinator Wilayah Kecamatan Gayam.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kabupaten Bojonegoro khususnya dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI BOJONEGORO,



DR. HJ. ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 23.

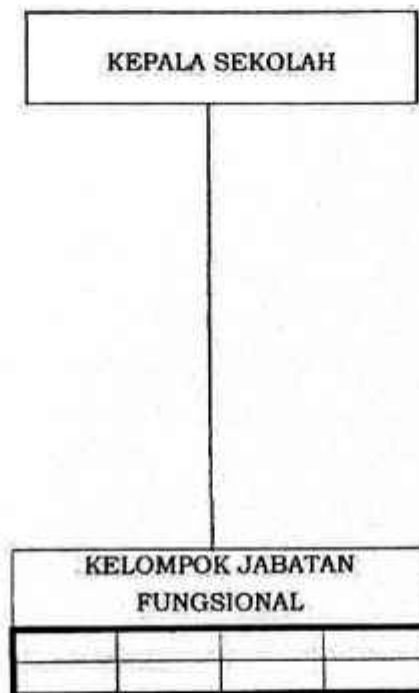
LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
DAN SEKOLAH DASAR (SD)



———— = GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740403 199403 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 23 TAHUN 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)



— = GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19740403.199403.1.003